



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA SUKABUMI (STUDI KASUS PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR)

Putri Menara Syakti^{1*)}, Dian Purwanti²⁾, Rizki Hegia Sampurna³⁾

¹Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
putrimnr@gmail.com

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

ABSTRAK

Pada awal tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia bebas dari penyakit menular dengan penyebaran yang sangat cepat. Pemerintah juga bekerjasama dengan stakeholder untuk melakukan pelayanan 4 promotif/edukasi, preventif/pencegahan, diagnosis, pengobatan/perawatan, dukungan dan isolasi pada penderita Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sejauh ini pegawai Pemerintah Kota Sukabumi memiliki keahlian yang mumpuni dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menjalankan pro-gram-program yang ada. Untuk sarana prasarana yang dimiliki oleh in-stansi belum dapat berjalan dan mendukung sepenuhnya dalam im-plementasi ini.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pandemi, Covid-19, PSBB.

ABSTRACT

In early 2020, the government is committed to making Indonesia free from infectious diseases with a very fast spread. The government is also working with stakeholders to provide promotive/educational, preventive/preventive, diagnosis, treatment/care, support and isolation services for sufferers of Covid-19. The purpose of this study was to find out how the implementation of policies for handling the Covid-19 pandemic in Sukabumi City (Case Study of Large-Scale Social Restrictions). The research method used in this study is a qualitative approach that is descriptive in nature by describing the actual phenomena that occur in the field. From the results of the study it was concluded that so far the Sukabumi City Government employees have qualified expertise and are in accordance with what is needed in carrying out existing programs. The infrastructure facilities owned by the agency have not been able to run and fully support this implementation.

Keywords: Policy Implementation, Pandemic, Covid-19, PSBB.

PENDAHULUAN

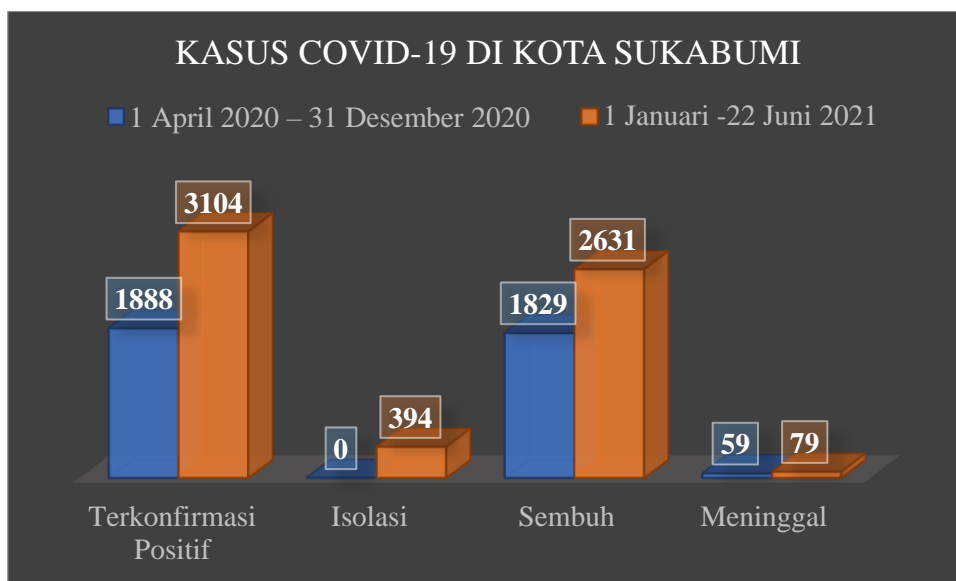
Sejak tahun 2019, *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi perhatian dunia yang berawal di Negara Tiongkok tepatnya di kota Wuhan. Virus ini menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat penanganan serius bagi seluruh swarga dunia tanpa terkecuali termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan penanganan penyakit ini masih belum ada obatnya serta tingkat laju perkembangan kasusnya secara global yang terus mengalami peningkatan. Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi yang berkembang paling cepat dengan kasus infeksi yang ada 735.124 kasus Covid-19 di Indonesia, dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 603.741 dan meninggal dunia sebanyak 21.994 pada 30 Desember 2020. (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sosial, 2020). Penularan virus Covid-19 di wilayah Jawa Barat sampai tanggal 30 Desember 2020 ada sebanyak 82.555 kasus dengan jumlah yang sembuh 69.561 kasus dan jumlah yang meninggal 1.161 kasus (Pusat Informasi & Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat, 2020). Saat ini penyebaran Covid-19 sudah dilaporkan dan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jawa Barat.

Adapun wilayah provinsi Jawa Barat yang mempunyai kontribusi tinggi meningkatnya penyebaran Covid-19, salah satunya di Kota Sukabumi. Berikut Statistik kasus Covid-19 yang dihimpun oleh Gugus Tugas Covid-19 Kota Sukabumi:

Tabel 1. Kasus Covid-19 di Kota Sukabumi

Rincian	1 April 2020 – 31 Desember 2020	1 Januari -22 Juni 2021
Terkonfirmasi Positif	1.888	3.104
Isolasi	0	394
Sembuh	1.829	2.631
Meninggal	59	79

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2021



Gambar 1. Kasus Covid-19 di Kota Sukabumi

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2021

Berdasarkan jumlah kasus yang teridentifikasi penyebaran Virus Covid-19 di Kota Sukabumi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu jumlah yang terkonfirmasi positif yaitu sejumlah 1.888 orang, lalu pada 6 bulan terakhir yakni 1 Januari 2021 sampai dengan 22 Juni 2021 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 3.104 orang. Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah berupaya dalam menangani kasus penyebaran Virus Covid-19 dengan melakukan tindakan dan pencegahan dalam penyebaran Virus Covid-19 di beberapa daerah dengan menerbitkan Peraturan yaitu:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .
2. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor: HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus.
3. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia



4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 atau COVID-19 di Jawa Barat.
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/ Hukham tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19.

Pada awal tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia bebas dari penyakit menular dengan penyebaran yang sangat cepat. Pemerintah juga bekerjasama dengan *stakeholder* untuk melakukan pelayanan promotif/edukasi, preventif/pencegahan, diagnosis, pengobatan/perawatan, dukungan dan isolasi pada penderita Covid-19. Mengingat sangat cepatnya penularan virus Covid-19, Pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan Perwal (Peraturan Walikota) Sukabumi Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Kota Sukabumi dan Surat Edaran Nomor 180/12/Huk tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Virus Corona, tertanggal 16 Maret 2020. Pemerintah sebagai penyelenggara tugas dan fungsi negara mempunyai peran dan posisi sentral dan strategis untuk melakukan penanganan kasus Covid-19 pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan penanganan khususnya penanggulangan masalah kesehatan dan sosial. Pemerintah daerah dapat merancang dan mengkoordinasikan aksi bersama seluruh elemen masyarakat, yang konkret dan rutin dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus Covid-19.

Pemerintah Kota Sukabumi dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkannya belum dirasa efektif karena masih banyak masyarakat belum menyadari akan bahaya Covid-19 sehingga menyebabkan kasus terkonfirmasi terus bertambah. Sebagai contoh, seperti halnya pemberlakuan PSBB dan beberapa kegiatan yang dinilai belum dilakukan oleh masyarakat Kota Sukabumi dan masyarakat kabupaten Sukabumi ataupun yang berdekatan dengan Kota atau yang aktivitasnya/kegiatan di wilayah Kota. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan dan permasalahan yang ditemukan ialah sebagai berikut :

Pertama, pada proses penyaluran komunikasi (transmisi) yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat Kota Sukabumi belum optimal. Meskipun sosialisasi sudah terlaksana oleh setiap petugas pemerintah seperti sosialisasi mengenai kegiatan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukuan oleh Walikota Sukabumi dengan berkeliling mengendarai sepeda motor yang mana tujuannya agar masyarakat mematuhi pelaksanaan PSBB untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 (Sumardi, 2020). Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi juga melakukan sosialisasi dengan berkeliling menggunakan mobil dan memberikan penjelasan kepada masyarakat Kota Sukabumi mengenai bahayanya virus Covid-19 yang dilaksanakan di daerah Keluarahan Jaya Mekar Kecamatan Baros (Kamlulloh, 2020).

Namun demikian, meskipun kegiatan sosialisasi tersebut sudah dilakukan hal ini belum menunjukkan adanya masyarakat yang memahami tentang tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran seperti tidak memakai masker pada saat keluar rumah (Herlina, 2020). Selain itu juga dibuktikan dengan membludaknya masyarakat untuk pergi ke pasar dan mall atau memborong kebutuhan pokok dan juga membeli baju hari raya Idul Fitri pada satu hari sebelum diberlakukannya PSBB yakni pada tanggal 5 Juni 2020. Anggapan masyarakat ketika PSBB diberlakukan yaitu semua toko tutup, hal tersebut menjadikan masyarakat untuk berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok dan baju hari raya sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan.



Gambar 2. Pelanggaran Terhadap Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2020.

Sumber: Sukabumiupdate.com, 2020.

Kedua, kurangnya sumber daya dalam hal ini fasilitas yang dapat mendukung pencegahan penyebaran virus Covid-19. Meskipun pemerintah sudah mulai menyediakan tempat cuci tangan di beberapa lokasi di wilayah Kota Sukabumi, namun fasilitas tersebut tidak berjalan secara permanen, artinya fasilitas tersebut kurang terawat dengan baik, tidak diisi air ataupun sabun, bahkan sampai fasilitas yang biasanya bisa ditemukan kini tidak lagi.

Ketiga, masih terjadinya pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi seperti tidak menggunakan masker saat keluar rumah, tidak mengindahkan pembatasan sosial, tidak menjaga jarak dan melanggar aturan batas waktu pembukaan toko yang menyebabkan orang berbelanja secara berkerumun.

METODE

Mencapai tujuan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan berbagai macam cara untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya untuk tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu, dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2018 : 218-219). Dalam penelitian ini terdapat 5 informan yakni Wali Kota Sukabumi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Ketua Satgas Covid-19 Kota Sukabumi, Ketua Pelaksana Harian Covid-19 Kota Sukabumi, dan Kepala BPBD Kota Sukabumi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi. Untuk menguji kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, dapat tiga teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu.



PEMBAHASAN

Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel, terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap kecendrungan), dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Indikator komunikasi berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa dalam implementasi suatu kebijakan, pelaksanaannya pasti melibatkan banyak orang dan tentu membutuhkan sebuah komunikasi serta koordinasi yang baik. Agar implementasi dapat efektif, penanggung jawab implementasi sebuah keputusan harus memahami apa saja yang mesti dilakukan. Dalam pengimplementasiannya, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus di transmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat, dan konsisten. Maka dengan demikian faktor komunikasi memiliki tiga aspek pokok, yakni : transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Adanya kebijakan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Kota Sukabumi, apakah Pemerintah Kota Sukabumi bertanggung jawab atas pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Dari hasil wawancara tersebut yang bersangkutan menjawab bahwa Pemerintah Kota Sukabumi bertanggung jawab secara penuh. Mengenai hal itu, Ketua Satgas Covid-19 Kota Sukabumi Sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 memberikan tanggapan bahwa dalam praktiknya satgas sendiri sebagai organisasi khusus yang menangani kondisi darurat covid-19 dibentuk mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan agar mudah berkordinasi.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Sukabumi Sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 maka dapat dipahami bahwa dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Kota Sukabumi ini sudah terealisasi dengan cukup baik, melalui komunikasi dengan pihak eksternal yang menjalankan operasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelumnya. Kemudian, peneliti pun bertanya kepada beliau mengenai apakah Pemerintah Kota Sukabumi telah tepat dalam pemilihan personel satgas atas pelaksanaan PSBB dalam penanganan pandemi covid-19, yang bersangkutan menjelaskan bahwa dalam praktiknya di lapangan, personil satgas dibentuk sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.

Keberhasilan sesuatu program atau kegiatan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak terbangun sebuah komunikasi dan koordinasi diantara penyelenggaranya. Kemudian, peneliti pun bertanya kepada Ketua Pelaksana Harian Covid-19 Kota Sukabumi Sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19, mengenai apakah perintah yang disampaikan Pemerintah Kota Sukabumi dalam melaksanakan protokol pandemi covid-19 telah jelas, akurat, dan konsisten. Mengenai hal itu, Ketua Pelaksana Harian Covid-19 Kota Sukabumi Sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 menjelaskan bahwa dalam menangani Covid-19 di Indonesia memang belum sepenuhnya berhasil mengendalikan penambahan kasus infeksi yang terjadi. Pemerintah masih belum menemukan pola yang tepat dan efektif dalam menekan tingkat penyebaran Covid-19.



Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, diketahui bahwa indikator komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar) sudah berjalan dengan baik, adapun hambatan yang didapat berasal dari kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Agusino (2012:141) sebagai berikut : Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

Sumber Daya

Implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil jika organisasi pelaksana implementasi dapat menggunakan sumber daya yang ada dengan baik. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu sumber daya yang utama dan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Di setiap tahapan pelaksanaannya, perlu ada peran sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu peneliti menanyakan apakah sumber daya manusia dalam proses penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi sudah tercukupi dari jumlah dan kemampuannya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Sukabumi, yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, beliau tidak hanya mengandalkan pemerintah saja karena itu penanganan bencana dan banyak juga para relawan BPBD, banyak orang yang peduli. Demikian pula dengan ketersediaan dan kapasitas mobilisasi sumber daya.

Berdasarkan jawaban dari informan 1 dalam Program Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar), sumber daya manusia dalam proses penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi sudah tercukupi. Pemerintah Kota Sukabumi memiliki pegawai dengan keahlian yang mumpuni dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam menjalankan program-program yang ada. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Harian Covid-19 Kota Sukabumi Sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 bahwa sumber daya manusia dalam proses penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi sudah tercukupi dan banyak relawan yang membantu. Oleh karena itu peneliti menanyakan kembali apakah sumber daya yang tersedia sudah cukup memahami bagaimana proses pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi. Mengenai hal itu, Ketua Satgas Covid-19 Kota Sukabumi Sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 memberikan tanggapan bahwa :

“ya sudah kan sudah di beri arahan harus apa dan bagaimana nya jadi mereka sudah pasti paham proses pelaksanaan PSBB, kan sudah ada tupoksinya masing-masing SKPD nya”

Oleh karena itu, dengan tersedianya SDM yang sudah cukup memahami bagaimana proses pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi akan mempermudah pemerintah dalam proses penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi. Selanjutnya peneliti menanyakan siapa yang berkewenangan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 dilaksanakan seperti yang diharapkan, yang langsung diberikan tanggapan oleh Ketua Satgas Covid-19 Kota Sukabumi Sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 yaitu :

“kalau untuk di BPBD sendiri masih alur komando contoh nya kalau ada vaksinasi kita ikut supporting sarana dan prasarana nya kita sediakan, struktur pemerintah nya masih sistem komando”



Peneliti berpendapat bahwa dimensi sumber daya belum maksimal hal ini disebabkan kurangnya anggaran yang diberikan jadi hanya sebagian sarana dan prasarana saja yang disediakan. Oleh karena itu peneliti menanyakan kembali apakah fasilitas dalam proses penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi sudah mencukupi dan memadai, yang langsung diberikan tanggapan oleh Kepala BPBD Kota Sukabumi Sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 yaitu :

“karena kita tidak ada anggaran khusus untuk covid jadinya tidak ada tapi alat untuk menunjang masalah covid kita ada seperti penyemprot terus tenda vaksinasi, BNPB juga ngasih bantuan obat, dan alat swab, jadi kalau khusus anggaran dari pemda mah gapapa”

Proses pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 pasti ditemukan berbagai faktor pendukung dan penghambat kelangsungan pelayanan yang diberikan bahwa hal terpenting yang menghambat Sumber Daya karena adanya pandemi, sehingga mengakibatkan kurangnya sosialisasi yang diberikan dan kurangnya minat masyarakat mengenai proses pelaksanaan PSBB juga menjadi suatu hal pertimbangan, dan tidak adanya anggaran khusus untuk covid. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Karena sumber daya manusia merupakan salah satu factor penting

Disposisi (*Disposition*)

Ditemukan beberapa hambatan yang ada peneliti menanyakan Bagaimana sikap dan pemahaman pelaksana kebijakan terhadap tugasnya untuk mengimplementasikan pelaksanaan PSBB dalam penanganan pandemi covid-19, yang langsung diberikan tanggapan oleh Ketua Satgas Covid-19 Kota Sukabumi sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 yaitu :

“sikap dan pemahaman pelaksana itu sesuai dengan tupoksi nya masing masing ya.”

Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Covid-19 Kota Sukabumi sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 yang mengatakan bahwa :

“sudah baik, karena kan sudah biasa juga”

Berdasarkan uraian diatas, dapat peneliti interpretasikan bahwa PSBB dalam penanganan pandemi covid-19 di Kota Sukabumi pada dasarnya telah menyesuaikan dengan regulasi yang telah di edarkan oleh Pemerintah Pusat dalam menjalankan Program Nasional tersebut, dan dalam Program Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar) dianggap sudah efektif karena semakin dipermudah dalam Program Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar) tersebut. Program Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar), peneliti menanyakan apakah terdapat pandangan kelompok/unit tertentu yang menghambat implementasi kebijakan, mengenai hal itu Kepala BPBD Kota Sukabumi sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 memberikan tanggapan bahwa :



“Paling penghambat itu dari kesadaran masing-masing kadang masih ada aja yang lupa memakai masker, ada saja pro dan kontra, kontra nya masih ada aja yang ga percaya sama covid”

Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Satgas Covid-19 Kota Sukabumi sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 yang mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan dari pihak satgas sendiri, lebih lanjut peneliti menanyakan apakah terdapat personel pengganti apabila pelaksana kebijakan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengenai hal itu Kepala BPBD Kota Sukabumi sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 memberikan tanggapan bahwa :

“ada ko, tapi kalau ditanya cukup apa enggak nya personil ya ga cukup, tapi kalau untuk relawan kan ada yang membantu”

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah pelaksana kebijakan telah puas terhadap kecukupan insentif/honor bagi pelaksana kebijakan untuk mendukung implementasi pelaksanaan PSBB dalam penanganan pandemi covid-19, mengenai hal itu Ketua Pelaksana Harian Covid-19 Kota Sukabumi sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 memberikan tanggapan bahwa :

“kalau untuk honor kan kita ga dapet kalau khusus untuk penanganan covid ”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti interpretasikan bahwa indikator proses rehabilitasi yang dilakukan sudah cukup efektif. Melalui pelaksanaan group therapy yang dilakukan secara bersama-sama. Pelaksanaan kebijakan ini meski sudah direspon dengan baik dan didukung oleh para *stakeholders* namun masih terdapat kekurangan dalam memberlakukan kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan ini didukung oleh para *stakeholders*, tetapi belum sepenuhnya.

Penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa dalam praktiknya ketika ada salah satu personil selaku pelaksana kebijakan tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka posisinya tersebut akan digantikan oleh personil lainnya dari tim berbeda. Namun hal tersebut dapat dilakukan jika personil lainnya sedang belum ada jadwal untuk melakukan penyedotan, tetapi ketika personil lain sedang memiliki jadwal yang padat, maka personil yang rekannya berhalangan harus melaksanakan tugas sendiri.

Struktur Birokrasi (*Bureauratice Structure*)

Berdasarkan teori Edwards III (1980:10-11), Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Lalu dilihat dari dimensi struktur birokrasi terdapat fragmentasi yang dimana setiap kebijakan pasti ada yang membuatnya, dari pembuatan kebijakan tersebut apa ada pertanggung jawabannya dari dinas terkait atau koordinasi terkait apa tidak terkait dari kebijakan penyelenggaraan perhubungan. Lalu ada standar prosedur operarasi yang dimana standar prosedur operasinya kuat atau tidak dalam memberikan instruksi ke lapangannya karena peran tersebut penting juga untuk mengefektifkan keadaan di lapangan dan komitmen aparatur juga penting karena komitmen itu sendiri bisa menguatkan kebijakan tersebut.

Maka dari itu peneliti menanyakan, Apakah terdapat *Standard Operational Prosedure* dalam pelaksanaan PSBB dalam penanganan pandemi covid-19, mengenai hal itu Kepala BPBD Kota Sukabumi sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 memberikan tanggapan bahwa :

“Adalah, kaya keharusan kita membubarkan masyarakat yng berkerumun sesuai SOP untuk menghindari covid kan kita tetap harus menjaga kesehatan masyarakat”

Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Covid-19 Kota Sukabumi Sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 yang mengatakan bahwa :

“tentu ada karena kita ga bisa melakukan pelaksanaan PSBB tanpa SOP”

Berdasarkan uraian diatas, dapat peneliti interpretasikan bahwa program pelaksanaan PSBB dalam penanganan pandemi covid-19 setiap saat nya selalu meningkat. Dalam Program Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar), peneliti menanyakan bagaimana pembagian kerja/tugas pada pelaksanaan PSBB dalam penanganan pandemi covid-19 di Kota Sukabumi, mengenai hal itu Ketua Satgas Covid-19 Kota Sukabumi sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 memberikan tanggapan bahwa :

“Sesuai dengan tupoksi dan kemampuan dari pegawai masing-masing aja.”

Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Covid-19 Kota Sukabumi sebagai penanggung jawab dan pelaksana kebijakan penanganan covid-19 yang mengatakan bahwa :

“sesuai tupoksi dari lintas sektor yang ada dong.”

Tanggapan tersebut peneliti dapat menginterpretasikan bahwa mengenai struktur birokrasi, peneliti menyimpulkan bahwa struktur birokrasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjalankan kebijakan penanganan covid-19 di Kota Sukabumi dapat dikatakan sangat baik dan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan mengacu pada pendapat Edward III, implementasi kebijakan penanganan covid-19 di Kota Sukabumi secara keseluruhan dari semua dimensi dapat dikatakan sudah cukup baik, meskipun masih terdapat komunikasi yang dilakukan secara ekstern masih kurang intens. Kemudian untuk sarana prasarana yang dimiliki oleh instansi belum dapat berjalan dan mendukung sepenuhnya dalam implementasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Charles O. Jones. 1977. *Public Policy :Pengantar Kebijakan Publik*. Terj : Ricky Istamto. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Creswell, C. John. 2016 *Research Design Edisi 4*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Meter, Donald Van dan Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation, Process, A Conceptual Frame Work Dalam Administration and Society*, London: Sage Publication.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offse.

- Purwanti, dkk. 2019. Pedoman Penulisan Skripsi, Laporan Ristik dan Jurnal Penelitian. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Purwanto, E. A. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Gava Media Press.
- Ripley, R.B., & Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: the Dorsey Press.
- Satori Djam'an, Komariah Aan, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tachjan. 2008. *Implementasi kebijakan public*, Bandung : AIPI dan Puslit KP2W lemlit UNPAD
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan : dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Meluwu. 2019. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS di Kota Palu*.
- Ramadani. 2017. *Implementasi Penanggulangan HIV/AIDS di Bandar Lampung (Studi pada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandar Lampung)*.

Aturan dan Undang-Undang

- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 atau COVID-19 di Jawa Barat.
- Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .
- Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Kota Sukabumi
- Surat Edaran Dirjen P2P Nomor: HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus.
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/ Hukham tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
- Surat Edaran Walikota Sukabumi Nomor 180/12/Huk tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Virus Corona

Sumber Tambahan

- Aida, Rohmi Nur. 2021. "Vaksinasi Covid-19 Mulai 13 Januari, Apa Saja yang Perlu Diketahui?". *Kompas.com*, 8 Januari 2021. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2021/01/08/120300865/vaksinasi-covid-19-mulai-13-januari-apa-saja-yang-perlu-diketahui>
- Herlina, Murni Sri. 2020. "Petugas Gabungan Periksa Masyarakat yang Tidak Menggunakan Masker, PSBB Kota Sukabumi". *Sukabumikota.go.id*, Mei 2020. <https://www.google.com/amp/s/dpmpstpsukabumikota.go.id/berita-umum/petugas-gabungan-periksa-masyarakat-yang-tidak-menggunakan-masker-psbb-kota-sukabumi/amp/>

Kamalulloh, Hikmat. 2020. "Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru di Jayamekar Kecamatan Baros".
Youtube BPBD Kota Sukabumi, 10 Agustus 2020. <https://bpbd.sukabumikota.go.id/>

